



► TAMAN PENGASUHAN ANAK

Dengan Rp5.000/Hari, Anak-Anak Peroleh Pendidikan Dini

Taman Pengasuhan Anak (TPA) saat ini banyak bermunculan di DIY. Tak hanya swasta, pemerintah juga ikut berkontribusi keberadaan TPA. Berikut laporannya.

Suara canda, tawa, dan teriakan anak-anak terdengar riuh di Taman Pengasuhan Anak (TPA) Beringharjo. Di lorong koridor, hentakan kaki kecil bocah yang berlari ke sana-sini, menggemakan ke seluruh penjuru gedung. Kondisi itu merupakan gambaran sehari-hari tempat penitipan

anak usia dini yang ada di Pasar Beringharjo, kawasan Malioboro. Tak sulit menemukan lokasinya, yakni di sisi selatan pintu utama pasar, berhadapan dengan area parkir. Bangunan bercat putih itu dulunya kantor pengelola pasar.

Koordinator TPA Beringharjo, Yustina Suyatni, berkisah taman ini merupakan bagian penting bagi anak-anak pedagang Pasar Beringharjo sejak 1994. TPA berbasis komunitas ini bermula dari keprihatinan Ati Widagdo, istri Wali Kota Jogja saat itu, dan permaisuri Raja

Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, melihat banyaknya pedagang yang terpaksa membawa anak-anak mereka ke pasar.

Sejak awal pendirian, TPA ini diharapkan bisa membantu para pedagang agar dapat berjualan dengan lebih tenang, sebab, anak-anak mereka diasuh dan mendapatkan pendidikan usia dini yang layak. "Awalnya, hanya ada 20-30 anak yang diasuh di sini," kata Yustina, Senin (24/2).



Sejumlah anak beraktivitas di TPA Beringharjo yang terletak di kawasan Malioboro, Senin (24/2).

► Halaman 10

Dengan Rp5.000/Hari,...

Memasuki awal 2000-an, jumlah anak yang bergabung merosot drastis hingga tersisa 8-9 orang saja. "Hampir membuat TPA ini ditutup."

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dicanangkan pemerintah pada 2006, membangkitkan TPA Beringharjo. Taman ini pun menyesuaikan diri, mengikuti model pendidikan anak usia dini yang diperkenalkan Dinas Pendidikan.

Kini, TPA Beringharjo telah berkembang, dan mampu menampung sekitar 60 anak setiap tahun. Pengelola sengaja membatasi karena keterbatasan tenaga pengasuh dan kapasitas ruangan. Padahal, minat orang tua untuk menitipkan anak mereka di sini cukup tinggi, terutama dari kalangan pedagang pasar.

"Banyak yang ingin masuk, tapi tenaga kami terbatas. Terkadang, kami pun harus mengurangi jumlah anak demi memastikan pengasuhan yang optimal," ujar Rila.

TPA Beringharjo tidak hanya menawarkan tempat penitipan, tetapi juga menerapkan program pendidikan usia dini seperti literasi, matematika sederhana, serta kegiatan sosial dan motorik.

Meski dikelola oleh PKK Kota Jogja, pengelolaan TPA Beringharjo tetap menerapkan pola kontribusi orang tua. Namun, iurannya terjangkau, yakni Rp5.000 per hari. Dana ini digunakan untuk menunjang kegiatan anak-anak. Jika anak tidak hadir, tidak ada biaya yang harus dibayar.

"Ini sebenarnya bukan biaya, karena nanti akan dikembalikan dalam bentuk makan siang dan kudapan bagi anak."

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada September 2024, melakukan standarisasi dan menetapkan TPA Beringharjo sebagai Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dengan peringkat Nindya.

TPA Seri Derma

Selain TPA Beringharjo, TPA Seri Derma di Umbulharjo, juga menawarkan layanan penitipan anak yang terjangkau.

TPA yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja (YKAR) Kongres Wanita Indonesia (Kowani) itu menempati kawasan cagar

budaya yang asri. TPA ini murni dikelola swasta, dengan biaya Rp600.000 per bulan, per anak. Biaya pendidikan itu sudah termasuk makan siang dan kudapan sehat.

Jika dibandingkan TPA lain yang dikelola swasta di Jogja, TPA Seri Derma ini bisa dikatakan terjangkau. "Biaya penitipan anak di Yogyakarta sekarang sudah di atas Rp1 juta," kata Kepala Sekolah Seri Derma, Riya Cahyani.

Saat ini, TPA Seri Derma mengurus 23 anak yang dibagi ke dalam tiga kelas. Pertama, kelas bayi untuk anak usia dua bulan hingga setahun. Kedua, kelas batita untuk anak usia dua tahun. Ketiga, kelompok bermain untuk anak usia tiga tahun.

Sama seperti TPA Beringharjo, Seri Derma tak hanya menawarkan layanan pengasuhan, tapi juga pengenalan materi membaca, menulis, dan berhitung. Lembaga ini berkolaborasi dengan sejumlah pihak agar layanan penitipan anak lebih optimal.

Menurut Riya, mayoritas bocah yang dititipkan di sini adalah anak yang ibunya bekerja sebagai ASN, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja swasta di Jogja.

Seri Derma punya enam guru yang berlatar belakang pendidikan SMA hingga sarjana. Para guru telah dibekali pendidikan kilat dan bersertifikasi dari Dinas Pendidikan. Para guru mendapat gaji dari yayasan sebesar Rp1 juta.

Riya mengatakan, nominal itu sebenarnya belum sesuai dengan beban kerja yang harus dihadapi, karena pekerjaan berat seperti mengasuh anak, menyuihkan anak, hingga memandikan anak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menambah gaji para guru yakni melalui bantuan insentif guru non ASN yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp200.000 per bulan.

Akademi dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Rita Pranawati, mengatakan penyediaan dan pengawasan terhadap layanan penitipan anak mendesak dilakukan. Apalagi telah ada Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan UU No.4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

Layanan penitipan anak yang

aman dan terjangkau sangat dibutuhkan seiring meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, dan perubahan situasi keluarga yang berdampak pada pengasuhan anak.

Tanggung jawab akan perawatan rumah dan keluarga kerap menjadi salah satu penghambat partisipasi perempuan. Belum lagi norma sosial menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama. Kondisi itu juga diadapkan pada kenyataan akan sulitnya mencari Asisten Rumah Tangga (ART). Persoalan lainnya, lingkungan kerja yang kurang mendukung.

"Padahal pengasuhan merupakan fondasi dalam pemenuhan hak. Agar hak anak dan kesejahteraannya terpenuhi," ujar Rila.

Rita menilai perlu manajemen pengasuhan untuk mengatasi situasi pengasuhan yang beragam, baik pengalihan pengasuhan temporer maupun permanen.

"Pertumbuhan layanan penitipan anak perlu diapresiasi sebagai alternatif solusi pengasuhan terutama pada masa emas kehidupan anak."

Masalahnya, belum semua layanan sesuai standar dan aturan yang berlaku, dan ketersediaan masih terpusat di Jawa. Sebanyak 44% layanan penitipan anak belum memiliki legalitas. Baru 30% layanan penitipan anak yang memiliki izin operasional, 12% memiliki tanda daftar, dan 13,3% memiliki badan hukum.

Mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dua periode itu mengungkapkan masih ada layanan penitipan anak yang dikelola secara sederhana, bahkan tidak punya kegiatan rutin dan jadwal layanan. Kondisi itu dapat membuat orang tua menjadi kurang percaya untuk menitipkan anak.

Tantangan lain, biaya TPA/TPS terutama di kota besar yang mahal.

Karena itu, perlu upaya advokasi dan dukungan pemerintah maupun pemberi kerja agar tersedia layanan penitipan anak yang terjangkau dan bisa diakses masyarakat. Idealnya, pemerintah dan perusahaan bergotong-royong mensubsidi layanan penitipan anak tersebut, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Jogja di TPA Beringharjo. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005